

BIDANG HUKUM

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



KONSTITUSI DAN DEMOKRATISASI : Studi tentang Model Penafsiran Konstitusi bagi Pengujian Konstitusional yang Demokratis di Indonesia

Ketua Peneliti:
Kelik Wardiono, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
September 2008

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR**

1. Judul : **KONSTITUSI DAN DEMOKRATISASI (Studi tentang Model Penafsiran Konstitusi bagi Pengujian Konstitusional yang Demokratis di Indonesia)**
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Kelik Wardiono,S.H.,M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 132 058 075
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor.
 - e. Jabatan Struktural : Wakil Dekan Fakultas Hukum – UMS
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi
 - g. Fak/Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - i. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas / Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Kelik Wardiono,S.H.,M.H.	Hukum ekonomi	Hukum / Ilmu Hukum	Univesitas Muhammadiyah Surakarta
2	Dr. Aidul Fitriciada Azhari,S.H.,M.Hum	Hukum Konstitusi	Hukum / Ilmu Hukum	Univesitas Muhammadiyah Surakarta

4. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
- a. Jangka Waktu Penelitian : 3 tahun.
 - b. Biaya Total yang diusulkan : 150.104.000
 - c. Biaya yang disetujui Tahun ke-2 : 45.000.000

Surakarta, 27 September 2008
Ketua Peneliti,



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Aidul Fitriciada Azhari,S.H.,M.Hum
NIP. 132 058 684

Kelik Wardiono,S.H.,M.H.
NIK. 132 058 075



Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian,

Dr. Markhamah, M.Hum.
NIP. 131683025

RINGKASAN

ABSTRAK

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Penafsiran tersebut dilakukan dengan memaknai gagasan kebebasan dalam UUD 1945. Namun demikian, selama berlakunya UUD 1945 ternyata penafsiran konstitusi tidak hanya melahirkan sistem yang demokratis, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya sistem yang otokratis.

Dalam penelitian ini, munculnya sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh perbedaan perspektif penafsiran atas UUD 1945, yakni perspektif internal dan eksternal. Semakin kuat perspektif internal bekerja dalam penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi. Sebaliknya, semakin kuat pengaruh perspektif eksternal terhadap bekerjanya penafsiran atas UUD 1945, maka semakin kuat kecenderungan untuk berimplikasi pada terbentuknya sistem demokrasi. Berdasarkan perspektif penafsiran tersebut berkembang pola-pola penafsiran orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, dan proseduralisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal dengan pengaruh perspektif eksternal pada dua pola terakhir. Sementara dari perspektif eksternal berkembang pola dekonstruksi.

Dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada tiga masalah, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* ini menggunakan pendekatan normatif, historis, dan komparatif serta teknik pengumpulan data kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa sejak awal kemerdekaan penafsiran konstitusi telah dilakukan untuk mendorong proses demokrasi dengan menggunakan pola penafsiran yang bekerja berdasarkan pengaruh perspektif eksternal, baik pola kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, maupun dekonstruksi. Pola penafsiran yang sama digunakan pula pada selepas Orde Baru yang di antaranya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. Penggunaan pola orisinalisme berdasarkan perspektif internal selama masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru terbukti berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.

Kata kunci : *penafsiran konstitusi, perspektif internal, perspektif eksternal, orisinalisme, kontekstualisasi nilai dasar, proseduralisme, dekonstruksi, hermeneutik, kritisisme tekstual, determinisme tekstual, demokrasi konstitusional, demokrasi partisipatoris, otokrasi, otoriter, totaliter.*

Summary

The constitutional interpretation is an effort to promote democracy in Indonesia that implemented by interpreting the meaning of the idea of freedom in the 1945 Constitution. Nevertheless, during the 1945 Constitution operational periods apparently the interpretation of constitution has not only yield the democratic system, but also implicated to the establishment of the autocratic system.

In this research, the emerging of those different constitutional systems is caused by difference of the interpretation perspective, i.e. internal and external perspective. The stronger internal perspective used in operation of the 1945 Constitution interpretation, the stronger its tendency to establish the autocracy system. The stronger external perspective used, the stronger its tendency to the democracy system.

Based on those interpretation perspective have been developed originalism, contextualization of fundamental values, and proceduralism as modes of constitutional interpretation that operated based on internal perspective with external perspective influence in two modes latest. While based on external perspective has been developed deconstruction.

By the scope of research on three problems, that is the State principle, structure on the State, and human rights, this descriptive-analytical research use normative, historical, and comparative approach and qualitative data collection procedure.

This research get the conclusion, that since the first independence period the constitutional interpretation has been worked to promote democracy by using interpretation modes that operated based on external perspective influence, both contextualization of fundamental values, proceduralism, and deconstruction. The same interpretation modes were used after New Order regime, among others to stimulate the amendment of the 1945 Constitution. The use of originalism based on internal perspective during Guided Democracy and New Order periods proved that the interpretation was implicated on the establishment of the autocracy system.

Keywords: *constitutional interpretation, internal perspective, external perspective, originalism, contextualization of fundamental values, proceduralism, deconstruction, hermeneutic, textual criticism, textual determinism, constitutional democracy, participatory democracy, autocracy, authoritarian, totalitarian, Constitutional Court.*

Prakata

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini.

Penelitian yang berjudul : KONSTITUSI DAN DEMOKRATISASI (Studi tentang Model Penafsiran Konstitusi bagi Pengujian Konstitusional yang Demokratis di Indonesia) merupakan penelitian hibah yang berupaya untuk menemukan model penafsiran terhadap konstitusi bagi pengujian konstitusional yang dinilai paling dapat mendorong proses demokratisasi di Indonesia.

Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya penelitian ini, ungkapan rasa terima kasi, kami haturkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga terlaksananya penelitian ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, September 2008
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
1. HALAMAN PENGESAHAN	ii
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB. III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	35
BAB. IV METODE PENELITIAN	36
BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	83
B. DRAFT ARTIKEL ILMIAH	84
C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN	117